

## Pemerataan Pendidikan Wilayah Sangat Tertinggal Melalui Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

Novia Dhara Yulithya<sup>1\*</sup>, Viza Juliansyah<sup>2</sup>, M. Sabran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tanjungpura

\*Corresponding author, e-mail: [noviadhrndy@gmail.com](mailto:noviadhrndy@gmail.com).

### Abstrak

Program Indonesia Pintar diposisikan sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi peserta didik berlatar belakang miskin dan rentan miskin, khususnya pada wilayah sangat tertinggal. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan perspektif sosiologis dalam menempatkan masyarakat wilayah sangat tertinggal sebagai subjek utama dalam memaknai dan memanfaatkan PIP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat dan dampak PIP terhadap peningkatan minat partisipasi peserta didik di wilayah sangat tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek utama penerima manfaat PIP dan informan kunci meliputi pihak dewan guru SDN 15 Benteng. Data dikumpulkan dari 13 informan meliputi 2 orang peserta didik penerima manfaat, 7 orang tua penerima manfaat, dan 4 dewan guru melalui wawancara mendalam selama periode Desember 2024 - April 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP telah membangun persepsi positif bagi penerima manfaat. PIP dapat membantu pemenuhan kebutuhan peserta didik, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesejahteraan, serta mengurangi angka putus sekolah pada wilayah sangat tertinggal. Namun demikian, pelaksanaan PIP juga menciptakan kecenderungan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah. Melalui analisis menggunakan teori rasionalitas terbatas dan teori pertukaran sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan PIP dipengaruhi oleh pertimbangan rasional masyarakat dalam kondisi keterbatasan ekonomi serta hubungan timbal balik masyarakat dengan negara untuk memperoleh bantuan dan keberlanjutan partisipasi pendidikan.

**Kata Kunci:** Pemerataan Pendidikan; Program Indonesia Pintar (PIP); Wilayah Sangat Tertinggal.

### Abstract

The Smart Indonesia Program (PDI) is positioned as a government policy instrument expected to reduce the gap in access to education for students from poor and vulnerable backgrounds, especially in very disadvantaged areas. This study offers a novelty by using a sociological perspective in placing communities in very disadvantaged areas as the main subjects in interpreting and utilizing the Smart Indonesia Program (PIP). This study aims to analyze the perceptions and impacts of PIP on increasing student participation interest in very disadvantaged areas. This study uses a qualitative approach with a descriptive type to understand social phenomena in depth. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, with the main subjects being PIP beneficiaries and key informants including the teachers of SDN 15 Benteng. Data were collected from 13 informants including 2 beneficiary students, 7 parents of beneficiaries, and 4 teachers through in-depth interviews during the period December 2024 - April 2025. The results of the study indicate that PIP has built a positive perception for beneficiaries. PIP can help meet student needs, expand access to education, increase awareness of the importance of education and welfare, and reduce dropout rates in very disadvantaged areas. However, the implementation of PIP also creates a tendency for communities to become dependent on government assistance. Through analysis using bounded rationality and social exchange theories, this study shows that PIP utilization is influenced by rational considerations within communities facing economic constraints, as well as by the reciprocal relationship between the community and the state regarding assistance and continued educational participation.

**Keywords:** Equitable Access to Education; Indonesia Smart Program (PIP); Underdeveloped Regions.

**How to Cite:** Yulithya, N. D., Juliansyah, V. & Sabran, M. (2025). Pemerataan Pendidikan Wilayah Sangat Tertinggal Melalui Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 12(2), 138-151.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2025 by Jurnal Socius.

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pengembangan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing (Aulia et al., 2024). Pendidikan dasar juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan individu untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, ketimpangan pendidikan menjadi kasus yang kerap terjadi di berbagai wilayah sehingga pemerataan pendidikan diangkat dalam isu global yang tercermin pada fokus keempat SDGs (*Sustainable Development Goals*) untuk meningkatkan kesempatan belajar yang merata dan keterjaminan kualitas pendidikan (Mulyani et al., 2023).

Pemerataan dan akses terhadap pendidikan di Indonesia sendiri belum sepenuhnya memadai, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sangat tertinggal. Keterbatasan ekonomi, infrastruktur, kondisi geografis, serta rendahnya tingkat kesadaran pendidikan menyebabkan kelompok masyarakat miskin, dan rentan miskin berada pada posisi yang tidak setara dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak (Hilmi et al., 2023). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya risiko putus sekolah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga persoalan sosiologis yang berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan kebijakan publik.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020, Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar diterapkan untuk meningkatkan kesempatan belajar dan pengembangan diri dengan pemberian bantuan langsung senilai Rp450.000,00/tahun kepada peserta didik kurang mampu atau kelompok rentan (Purnama & Puspita., 2024). Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kebijakan bantuan pendidikan seperti PIP merupakan bagian dari proses sosial yang mempengaruhi cara individu dan kelompok mengambil keputusan pendidikan. Keterbatasan ekonomi, informasi, dan tekanan struktural mendorong peningkatan angka putus sekolah dan praktik kerja anak demi membantu memenuhi kebutuhan hidup (Septiawati et al., 2022).

Dalam menganalisis fenomena ini akan menggunakan teori rasionalitas terbatas dan teori pertukaran sosial sebagai kerangka analisis. Teori rasionalitas terbatas menjelaskan bahwa pilihan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan pendidikan dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, kondisi ekonomi, dan tekanan struktural yang mereka hadapi (Esther & Mirjam., 2018). Dalam masyarakat wilayah sangat tertinggal, keputusan untuk melanjutkan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh sejauh mana bantuan pendidikan mampu meringankan tekanan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat peserta didik untuk sekolah (Safitri & Nurmawati., 2018).

Pada sisi lain, teori pertukaran sosial memandang hubungan antara negara dan masyarakat penerima manfaat sebagai relasi timbal balik bantuan pendidikan dalam membentuk pola ketergantungan maupun keberlanjutan partisipasi pendidikan (Kustiawan et al., 2015). Dalam hal ini, PIP kerap kali menjadi salah satu sumber penerimaan bagi keluarga penerima manfaat, sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan sebagai nilai tukar akan bantuan pendidikan yang diterima (Bernice, 2019). Bantuan yang diberikan negara tidak hanya berdampak pada akses pendidikan, tetapi juga membentuk ekspektasi sosial masyarakat terhadap peran negara dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap Program Indonesia Pintar perlu mempertimbangkan dimensi rasionalitas dan relasi sosial untuk memahami dampak sosiologis program secara lebih komprehensif.

Ketimpangan di pedesaan khususnya wilayah sangat tertinggal terbentuk akibat kemiskinan struktural yang dialami masyarakat. Dalam kondisi tersebut, orang tua kerap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan pendidikan anak (Nurokhmah., 2021). Dalam konteks ini, bantuan PIP dapat menjadi faktor pendorong keberlanjutan pendidikan, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila tidak disertai dengan pendampingan dan penguatan kesadaran pendidikan jangka panjang (Hermawati. et al, 2024).

SDN 15 Benteng merupakan sekolah dasar negeri dalam kategori wilayah sangat tertinggal Kabupaten Bengkayang dengan penerima PIP terbanyak sejak 2022-2024 (Kemendikbud, 2024). Dengan itu menunjukkan jumlah masyarakat rentan dan kurang mampu di daerah sangat tertinggal masih tergolong tinggi. Berdasarkan data wawancara, penurunan jumlah peserta didik disebabkan oleh adanya penurunan angka masyarakat usia sekolah dasar dalam setiap penerimaan peserta didik baru. Sehingga jumlah peserta didik mengalami penurunan sedangkan angka penerima bantuan cenderung lebih stabil karena sebagian besar peserta didik masuk sebagai penerima bantuan PIP. Data penerimaan bantuan PIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Data Penerima Bantuan PIP SDN 15 Benteng 2022-2024**

Tahun	Penerima Bantuan	Peserta Didik
2022	142	165
2023	155	155
2024	134	150

Sumber Data: Kemendikbud 2022-2024 dan Dapodik SDN 15 Benteng

Berdasarkan hasil observasi lapangan, SDN 15 Benteng berada di lembah bukit dengan akses jalan tanah kuning berbatu yang sebagian masih rusak berat. Jarak tempuh dari pusat kabupaten Bengkayang menuju Desa Benteng berjarak 15 km dengan rata-rata waktu tempuh sekitar 60 menit, yang menjadi makin sulit dilalui pada musim hujan. Sebagian besar orang tua peserta didik bekerja sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil, serta masih kuatnya pola sosial tradisional yang memengaruhi rendahnya kesadaran pendidikan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dan minat partisipasi peserta didik (Nisa & Samputra, 2020). Kondisi ini memperkuat relevansi penggunaan teori rasionalitas terbatas, di mana keputusan pendidikan masyarakat dibentuk oleh keterbatasan ekonomi, informasi, dan peluang struktural yang tersedia.

Meskipun pelaksanaan PIP telah menjangkau banyak wilayah, kajian yang menempatkan masyarakat wilayah sangat tertinggal sebagai subjek sosial dengan perspektif sosiologis masih relatif terbatas. Dalam salah satu penelitian tentang pemerataan pendidikan memberikan analisis bahwa faktor yang mendorong penyebab ketidaksetaraan pendidikan Indonesia dapat meliputi faktor kemiskinan, infrastruktur, geografis, kualitas pendidikan, serta kebijakan seperti PIP yang efektivitas pelaksanaannya masih terhambat akibat regulasi yang terjadi (Mughtar et al., 2025). Dalam penelitian tentang pelaksanaan PIP pada salah satu wilayah di Kabupaten Bengkayang telah mengkaji secara spesifik terkait skema regulasi implementasi PIP dalam upaya meningkatkan minat partisipasi peserta didik serta persepsi pihak pemerintah, dewan guru, serta orang tua dalam pelaksanaan regulasi PIP (Dimmera & Purnasari, 2020).

Secara spesifik, persepsi masyarakat dalam menentukan keputusan melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh indikator keberhasilan regulasi dalam penyaluran PIP (Hermawati et al., 2024). Dalam penelitian berkaitan tentang bantuan sosial, walaupun tidak berfokus hanya pada PIP, menyebutkan bahwa dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, bantuan sosial kerap menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan ketergantungan (Hermawati et al., 2021).

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menyoro PIP sebagai kebijakan administratif dengan fokus pada skema, regulasi, dan mekanisme pencairan dana. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis sosiologis peran PIP terhadap minat partisipasi peserta didik di wilayah sangat tertinggal yang dipengaruhi oleh persepsi, pertimbangan rasional, dan relasi sosial. Penelitian ini berfokus pada SDN 15 Benteng sebagai studi kasus untuk mengungkap realitas sosial lokal wilayah sangat tertinggal yang jarang terangkat dalam kajian sebelumnya. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan sosiologis yang mengaitkan kebijakan bantuan pendidikan dengan persepsi masyarakat, dampak program terhadap pendidikan, hingga ketergantungan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat dan dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap peningkatan minat partisipasi peserta didik di wilayah sangat tertinggal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang akan menganalisis peran Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan minat partisipasi peserta didik wilayah sangat tertinggal untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dalam kurun waktu Desember 2024 - April 2025. Lokasi penelitian dilakukan di SDN 15 Benteng, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kabupaten Bengkayang sebagai wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di Indonesia, sehingga SDN 15 Benteng

mewakili sekolah dasar di wilayah 3T tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati dinamika pemanfaatan PIP oleh peserta didik. Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 15 Benteng. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang meliputi, 2 peserta didik penerima PIP, 7 orang tua penerima manfaat, serta informan kunci seperti kepala sekolah, dan 3 orang guru SDN 15 Benteng. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto/potret yang berkaitan dengan pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk memastikan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Abdussamad, 2021). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tiap informan agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menghindari bias informasi. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan pengumpulan data yang berbeda, guna menilai konsistensi dan memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang dan mendalam hingga data dianggap mencapai tingkat kejenuhan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### Persepsi Masyarakat Terhadap PIP

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) wilayah sangat tertinggal seperti SDN 15 Benteng, sudut pandang masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan peningkatan minat partisipasi pendidikan. Persepsi mencerminkan cara pandang masyarakat dalam menilai, merespon, dan memahami pelaksanaan PIP dalam kehidupan sosial (Hasan et al., 2021). Bagi masyarakat kurang mampu di wilayah sangat tertinggal seperti SDN 15 Benteng, biaya pendidikan menjadi salah satu hambatan utama dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Dengan bantuan PIP sebesar Rp450.000,00/tahun kiranya dapat memenuhi semua kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, alat tulis, tas, dan perlengkapan penunjang lainnya (Adelia et al., 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Neneng (29) sebagai ibu rumah tangga dan petani, orang tua peserta didik penerima manfaat PIP SDN 15 Benteng yang menyebutkan bahwa.

“...Yang jadi masalah tu ada ndanya uang untuk beli keperluan sekolah. Kalau PIP cair baru bisa belanja sekolah anak, itupun kadang kurang juga untuk belanja, kita belikan satu-satu dulu. Jadi uang 450 ribu kadang untuk beli tas, sepatu, sama alat tulis, mana yang paling rusaklah, setidaknya nyicil. Harga barang makin mahal, uang PIP untuk beli alat sekolah dia jak kurang, apalagi kalau nda dapat bantuan PIP, ya terasa lah. Kemarin yang dia nda dapat bantuan jak baju seragamnya pakai bekas abang sepupunya yang udah SMP. Mau diomong apa, uang PIP untuk beli alat sekolah dia jak kurang, apalagi kalau nda dapat bantuan PIP...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Dalam wawancara dengan Bapak Joni Martin (40), orang tua penerima manfaat PIP SDN 15 Benteng dalam wawancara dengan peneliti yang menyebutkan bahwa.

“...Kalau uang segitu untuk beli semuanya sih pasti kurang, jadi berusaha hemat-hemat pakai barang. Semua keperluan sekolah dia udah ada, baju sekolah bisa diganti 2 tahun sekali, tas 1 tahun masih bisa pakai asal belum rusak. Nanti uang PIP cair, langsung belanja alat sekolah yang rusak. Kalau lebih, kadang setengahnya dipakai untuk belanja dulu, namanya juga kita ni susah cari uang kan. Kalau misalnya ada barang sekolah yang rusak dan emang harus ganti, bisa coba jual padi dulu buat nutupnya. Di awal musim panen sih enak, uang PIP masih bisa disimpan. Jadi uang PIP dipakai untuk beli yang rusak aja, sisanya bisa di simpan, kemarin ada dipakai juga buat berobat sama beli bahan dapur...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan kerap dinomor duakan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Dengan bantuan PIP yang terbatas, masyarakat tetap merasa dirugikan dalam memenuhi keperluan pendidikan (Dimmera & Purnasari, 2020). Selain itu, karena kondisi perekonomian yang terbatas dan sistem pertanian yang bergantung pada alam, membuat kebutuhan hidup sehari-hari harus lebih di prioritaskan (Septiawati et al., 2022). Keputusan menggunakan bantuan PIP untuk berobat atau membeli keperluan sehari-hari tidak serta-merta dimaknai sebagai bentuk

---

penyalahgunaan bantuan. Keputusan ini mencerminkan tindakan rasional yang diambil untuk kebutuhan bertahan hidup yang lebih mendesak. Keterbatasan sumber pendapatan dan kebutuhan yang mendesak mendorong terbentuknya keputusan menggunakan dana PIP diluar peruntukan formalnya.

Pencairan dana PIP dilakukan dan dikelola secara langsung oleh orang tua peserta didik (Adolph, 2025). Dengan dana bantuan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta penopang dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik menjadi alasan orang tua untuk terus berpartisipasi melanjutkan pendidikan peserta didik (Siagian, 2024). Persepsi positif terhadap PIP terbukti dapat mendorong minat partisipasi pendidikan peserta didik. Dana insentif berupa uang tunai dari PIP memberikan motivasi bagi orang tua untuk mempertahankan partisipasi pendidikan, demi memperoleh bantuan tunai pada tahun berikutnya (Kaidah & Ruslan, 2022). Secara tidak langsung, PIP membentuk relasi timbal balik antara negara dan masyarakat penerima manfaat yang membangun ekspektasi sosial bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak. Dalam relasi ini, masyarakat mempertahankan partisipasi pendidikan sebagai bentuk respons atas bantuan yang diterima, dengan harapan bahwa dukungan tersebut akan terus berlanjut.

Kultur sosial yang mendukung pendidikan menjadi kekuatan sosial yang memperkuat keberhasilan PIP dan menciptakan pemerataan pendidikan pada wilayah sangat tertinggal (Hasan et al., 2021). Namun, relasi pertukaran tersebut juga mengandung potensi ketergantungan. Ketika PIP menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pendidikan, masyarakat cenderung menggantungkan keberlanjutan pendidikan pada keberadaan bantuan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan PIP secara sosial tidak hanya diukur dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu membangun kesadaran pendidikan jangka panjang tanpa menciptakan ketergantungan struktural.

### **Dampak Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Minat Partisipasi Peserta Didik Wilayah Sangat Tertinggal Di SDN 15 Benteng, Kabupaten Bengkayang**

Pelaksanaan PIP memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap minat partisipasi peserta didik wilayah sangat tertinggal untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan PIP diberikan dalam bentuk bantuan dana tunai kepada peserta didik digunakan untuk dapat meringankan beban pendidikan seperti pemenuhan kebutuhan sekolah, hingga kebutuhan dasar harian lainnya. dari keluarga kurang mampu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan kelengkapan sekolah (Munawwarah et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, indikator keberhasilan program tidak hanya dilihat dari mekanisme penyaluran tetapi juga cara masyarakat merespons PIP. Persepsi positif mengenai pelaksanaan PIP akan berdampak positif dalam meningkatkan minat partisipasi peserta didik wilayah sangat tertinggal untuk melanjutkan pendidikan (Setyaningrum et al., 2023). Selain itu, hal ini turut mendorong pemaksimalan dampak dari PIP dalam jangka panjang. Semakin besar dampak yang diberikan oleh PIP, akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peserta didik.

PIP berdampak dalam mendorong perluasan akses pendidikan. Bantuan yang diterima akan membangun rasionalitas masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan bagi orang tua dan peserta didik dalam jangka panjang (Uriyalita, Syahrodi, & Sumanta, 2020). Hal tersebut turut mendorong penurunan angka putus sekolah di wilayah sangat tertinggal. Pada sisi lain, pemberian bantuan PIP ini berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap Program Indonesia Pintar (Bernice, 2019). Berikut ini beberapa dampak dari PIP terhadap minat partisipasi peserta didik wilayah sangat tertinggal SDN 15 Benteng. Dengan demikian, analisis dampak ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi PIP dalam upaya pemerataan pendidikan di daerah yang secara geografis dan sosial mengalami keterbatasan.

#### ***PIP Untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan***

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk memberikan bantuan dana langsung tunai kepada peserta didik dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembelian alat tulis, baju seragam, sepatu, dan lain sebagainya (Romanti, 2023). Perekonomian keluarga kerap membatasi pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wilayah sangat tertinggal. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan, meningkatnya risiko putus sekolah, serta rendahnya motivasi belajar peserta didik.

Kelengkapan sekolah tidak terbatas untuk memenuhi standar pendidikan dan kesiapan peserta didik secara fisik. Pemenuhan kebutuhan pendidikan turut mempengaruhi minat partisipasi peserta didik untuk belajar di sekolah. Hal tersebut juga mempengaruhi rasa kepercayaan diri dan kenyamanan bagi peserta didik dalam upaya mendorong efektifitas pembelajaran dan membangun lingkungan belajar yang nyaman. Sebaliknya, keterbatasan perlengkapan belajar dan kondisi kelayakan yang kurang dapat menyebabkan munculnya rasa tidak percaya diri peserta didik yang mempengaruhi semangat belajar (Syarifa et al., 2022).

Dalam dengan peserta didik penerima manfaat PIP di SDN 15 Benteng Rina Putri (11), menyebutkan bahwa.

“...Kemarin habis PIP cair, mama bilang itu uang untuk sekolah. Habis itu mama ajak kepasar untuk belanja, pilih sepatu baru, alat pramuka sama jajan. Sepatu yang ini masih pakai yang lama soalnya sepatu baru sayang dipakai untuk semester baru. Kalau Sekarang baju seragam, sepatu, tas, kaos kaki, sepatu, buku alat tulis, sama dasi udah ada semua. pakai tas sama sepatu rusak, kawan-kawan suka olok (ngejek), dibilang sepatu buaya karena bolong di depannya. Jadi malu mau ke sekolah kalau ada yang rusak. Kalau nda ada uang biasa mama perbaiki dulu atau kadang pakai punya abang yang lama, PIP cair baru beli ganti. Kalau baru masuk sekolah (semester baru), senang karena pakai sepatu baru sama baju baru. Apalagi kalau bagi raport biasa suka juara, jadi dapat hadiah, buku baru sama pulpen...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Dalam wawancara dengan orang tua peserta didik turut menegaskan bahwa pemenuhan perlengkapan sekolah menjadi faktor penting dalam membangun semangat anak untuk bersekolah. Wawancara dengan Ibu Emilia Karesek (38) selaku orang tua penerima manfaat PIP SDN 15 Benteng, menyebutkan bahwa.

“...Waktu itu dia minta syarat untuk sekolah asal dibelikan sepatu sama tas, jadi biar dia mau sekolah mamanya belikan. Namanya anak-anak ya, kalau ada baju baru, tas baru atau buku baru pasti semangat ke sekolah. Pagi-pagi udah siap untuk ke sekolah bawa tas barunya. Kemarin sepatunya koyak jak dia malu, nda mau kesekolah katanya di tegur sama pak Dili, jadi dia lapor sama orang tua minta ganti sepatu baru, pas PIP cair baru bisa beli sepatunya. Sekarang kebutuhan sekolah semuanya udah ada, anakpun kadang ngadu kalau barangnya rusak. karena kondisi agak serba kekurangan, untuk beli baru semuanya nda cukup walaupun pakai uang PIP jadi kadang beli satu-satu dulu yang penting masih bisa dipakai, yang rusak masih bisa dijahit...” (Wawancara tanggal 17 Februari 2025).

Keputusan pendidikan keluarga tidak semata-mata didasarkan pada nilai ideal pendidikan, melainkan pada pertimbangan praktis yang dibentuk oleh keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial. PIP menjadi solusi praktis yang memungkinkan peserta didik tetap melanjutkan pendidikan dengan beban biaya yang lebih ringan (Kaidah & Ruslan, 2022). Bantuan yang diberikan melalui PIP memungkinkan peserta didik untuk tetap bersekolah dan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial orang tua. Dengan demikian, PIP berperan penting sebagai instrumen intervensi negara dalam menjaga keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di wilayah sangat tertinggal (Pratiningsih, 2024). Dengan demikian, keberadaan PIP menjadi bentuk intervensi negara yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan melalui kebijakan afirmatif. Sebagai bentuk visualisasi kondisi lapangan, penelitian ini juga mendokumentasikan kelengkapan seragam peserta didik di SDN 15 Benteng.



**Gambar 1. Kelengkapan Seragam Sekolah SDN 15 Benteng**  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Berdasarkan pada Gambar 1. menunjukkan bahwa sebagian besar atribut seragam peserta didik relatif lengkap dan sesuai dengan ketentuan standarisasi pendidikan Indonesia, meliputi pakaian seragam merah putih, sepatu, dasi, dan topi yang sebagian besar sudah lengkap. Kondisi ini mencerminkan peran PIP dalam membantu pemenuhan atribut pendidikan dasar bagi peserta didik di wilayah sangat tertinggal. Meskipun belum sepenuhnya ideal, kelengkapan seragam tersebut menjadi indikator bahwa bantuan PIP berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan memberikan semangat belajar bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas belajar di sekolah. PIP menjadi solusi langsung jangka pendek dalam mengatasi masalah keterbatasan ekonomi keluarga (Retnaningsih, 2019). Dengan Program Indonesia Pintar

---

mendorong keberhasilan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan peserta didik.

#### ***PIP Untuk Memperluas Akses Pendidikan***

Dalam perspektif sosiologi, perluasan akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi keluarga dan dukungan orang tua (Siagian, 2024). Tingginya impian peserta didik mengalami pertimbangan dari pengaruh lingkungannya. Faktor ekonomi menjadi penentu dalam memutuskan untuk melanjutkan pendidikan oleh masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga kerap kali peserta didik mengalami hambatan untuk bersekolah karena faktor ekonomi keluarga.

Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerataan pendidikan dan meningkatkan minat partisipasi peserta didik berdampak dalam perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Program Indonesia Pintar memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan (Retnaningsih, 2019). Skema bantuan PIP terus mengalami peningkatan setiap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga semakin tinggi jenjang akan memberikan dukungan bantuan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang makin kompleks.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan Ester Claudia (10) selaku peserta didik penerima manfaat PIP SDN 15 Benteng, menyebutkan bahwa:

“... Waktu kelas 1, cita-cita saya mau jadi guru, kayak Pak Dili. Lalu sekarang mau jadi dokter, bisa bisa sembuhkan orang sakit. Kata pak Dili, kalau mau jadi dokter harus pintar, makanya mau sekolah rajin-rajin biar bisa pintar, saya juga sering juara kelas. Nanti habis lulus SD mau lanjut ke SMP 4 Teriak, biar nda jauh dari rumah, hemat ongkos. Tapi nanti mau ke SMA 1 Bengkayang, katanya disitu banyak orang pintar. Habis itu mau lanjut kuliah ke Pontianak juga kayak kakak sama oom saya. Kalau mau kuliah mama bilang boleh, asal sekolah betul-betul sama kalau ada uangnya, kan kuliah mahal jadi sekalian nabung jajan dari sekarang...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PIP memberikan ruang bagi peserta didik untuk membangun orientasi masa depan melalui pendidikan, meskipun keberlanjutan aspirasi tersebut masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan Sumardi (45) selaku orang tua peserta didik penerima manfaat PIP sebagai berikut:

“... Anak saya yang sekolah ada 4, yang tua di SMA, SMP satu, sama yang SD 2. Paling berat itu ya biaya sekolah yang SMA, apalagi dia swasta nda dapat PIP. syukurnya di SD mereka semua selalu dapat walau kadang bolong-bolong, untuk keperluan juga bisa pinjam barang lama abangnya untuk adeknya sekolah. soal tamat, mereka mau sekolah sampai kuliah ya boleh kalau kita mampu. Tapi kalau nda dapat bantuan PIP lagi, mungkin susah lah, sekarang yang SMP sama SMA juga kerja sambil sekolah, bantu kesawah. pengennya sekolahkan anak tinggi-tinggi, mana tau dia jadi orang kan, tapi kuliah tu mahal...” (Wawancara tanggal 17 Februari 2025).

Keinginan Ester untuk melanjutkan pendidikan merefleksikan dampak dari pendidikan untuk melakukan mobilitas sosial. Namun, keinginan peserta didik untuk mengakses pendidikan menjadi terbatas karena harus mempertimbangkan rasionalitas atas kondisi ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Sumardi sebagai orang tua yang secara eksplisit mempertimbangkan pendidikan dengan perhitungan biaya yang tersedia dan manfaat sosial yang diberi. Pilihan yang diambil bukanlah pilihan ideal, melainkan pilihan yang paling mungkin dilakukan serta ketergantungan pada bantuan PIP (Safitri & Nurmawanti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan tidak sepenuhnya ditentukan oleh motivasi atau kesadaran akan pentingnya pendidikan, melainkan oleh kalkulasi praktis mengenai kemampuan bertahan secara ekonomi.

Pelaksanaan PIP memperluas jangkauan pendidikan bagi peserta didik yang beresiko untuk tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi (Kaidah & Ruslan, 2022). Bantuan PIP menjadi insentif sekaligus bentuk dukungan negara yang akan ditukar dengan komitmen keluarga dan peserta didik untuk tetap bersekolah, berprestasi, dan mempertahankan partisipasi pendidikan. PIP tidak hanya memperluas akses pendidikan secara material, tetapi juga membentuk pola partisipasi pendidikan yang dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap bantuan negara. Dengan demikian, PIP mempengaruhi orientasi dan keputusan pendidikan keluarga melalui logika timbal balik antara bantuan dan keberlanjutan pendidikan.

#### ***PIP mendorong Peningkatan Kesadaran Akan Pendidikan dan Kesejahteraan.***

Kesadaran orang tua akan tuntutan dunia kerja serta kondisi yang dialami masyarakat, menumbuhkan kesadaran akan kesejahteraan jangka panjang untuk peserta didik (Uriyalita et al., 2020).

---

Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat yang mengalami perkembangan profesi yang mulanya hanya sebagai petani menjadi guru, anggota perangkat desa, dan buruh dengan penghasilan yang lebih stabil (Muflikhan, 2024). Pekerjaan tersebut umumnya memerlukan kualifikasi pendidikan minimal lulus SMA, sehingga mendorong kesadaran atas pentingnya pendidikan formal sebagai syarat mobilitas sosial dan ekonomi.

Tumbuh harapan agar generasi penerus memperoleh pendidikan yang lebih baik demi masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing (Erawati et al., 2023). Kesadaran ini tercermin dalam pernyataan orang tua peserta didik penerima manfaat PIP yang menilai pendidikan sebagai jalan untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Buding (30) selaku orang tua peserta didik penerima manfaat PIP, turut menyebutkan bahwa.

“...Umur dia sekarang paling bantu dikit di sawah ladang karena masih kecil. Kita petani panas hujan di bantai, seumur hidup pun jadi petani, hasilnya untuk makan sama belanja dikit-dikit itu jak. Maka nyuruh mereka sekolah, orang tua dulu karena nda ada uang, anak jangan kayak orang tuanya. Manalah tau nasib baik, dapat kerja yang nda harus panas-panas tapi gaji tetap, kalau bisa sampai kuliah bisa pns, atau nda setidaknya tamatan SMA bisa kerja di kantor desa. Untuk kuliah si kita belum tau ya, untuk sekolah sekarang jak mati-matian demi anak, walaupun ada PIP, jadi semoga SMP SMA dia pun bisa dapat PIP juga...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Along (41), salah satu guru yang telah mengabdikan selama 20 tahun dan warga asli Benteng, menyebutkan bahwa:

“...Sekarang orang tua disini udah mulai sadar nyekolahkan anak sih, khususnya SD Benteng ya. 20 tahun yang lalu sih mungkin kurang lah, tapi 10 tahun ini apalagi ada PIP anak-anak semua berpendidikan istilahnya. Walau rentan putus sekolah di SMP/SMA karena nda ada biaya, kerja, atau ada juga yang nikah. tapi sebagian lulusan SD ini juga banyak yang lulus SMA, udah kerja, jadi tentara 3 orang disini, ada yang jadi pengusaha, staf desa, ada juga yang jadi karyawan. Gajinya lebih tinggi dari orang tuanya yang cuma petani, lebih tetap juga, karena kita petani kan kerja untuk makan sehari-hari bukan dijual kayak sistem gaji selama sebulan...” (Wawancara tanggal 04 April 2025).

Orang tua memandang pengalaman putus sekolah menjadi petani dengan pendapatan tidak menentu sebagai kondisi yang tidak ingin diwariskan kepada anak mereka. Oleh karena itu, meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi, mereka tetap berupaya mempertahankan pendidikan anak dengan memanfaatkan bantuan PIP sebagai penopang utama biaya pendidikan. Bantuan PIP menjadi pertukaran dengan komitmen keluarga dan peserta didik untuk mempertahankan partisipasi pendidikan. Harapan agar anak dapat menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah bahkan tinggi menjadi bagian dari orientasi kesejahteraan jangka panjang keluarga (Ananta et al., 2024).

Bantuan PIP mengurangi tekanan struktural sehingga pendidikan menjadi pilihan rasional yang paling menguntungkan dibandingkan membiarkan anak tidak bersekolah. Rasionalitas ini bukan pilihan ideal, melainkan dari pilihan yang paling memungkinkan dalam situasi keterbatasan (Esther & Mirjam, 2018). Namun dengan bantuan PIP menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mempertahankan partisipasi pendidikan tanpa harus sepenuhnya mengorbankan kebutuhan ekonomi lainnya.

Tuntutan kerja yang semakin menyempitkan kesempatan kerja bagi masyarakat tanpa pendidikan dan keahlian, memperkuat pandangan masyarakat bahwa manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang perlu dikeluarkan (Verawati et al., 2021). Dengan bantuan PIP dapat memberikan akses pendidikan kepada peserta didik yang dalam jangka panjang, pendidikan akan memberikan dampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, PIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai mekanisme pertukaran sosial yang membentuk orientasi, motivasi, dan keputusan pendidikan di wilayah sangat tertinggal.

#### ***PIP Mendorong Penurunan Angka Putus Sekolah***

Rendahnya penghasilan keluarga dapat mendorong orang tua yang meminta anaknya untuk membantu bekerja. Sehingga konsentrasi anak untuk belajar menjadi terpecah dan lebih memilih untuk bekerja dengan pertukaran ekonomi yang menambah penghasilan (Kholidah et al., 2025). PIP diluncurkan dengan tujuan untuk meringankan beban pendidikan dan menarik peserta didik yang putus sekolah untuk dapat terus melanjutkan pendidikan. Selain sebagai insentif untuk menarik minat partisipasi pendidikan, PIP turut memberikan rasa aman bagi orang tua peserta didik untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang tertinggi (Uriyalita et al., 2020). PIP dirancang sebagai intervensi negara untuk meringankan beban

---

pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erni (42) selaku orang tua peserta didik penerima manfaat PIP menyebutkan bahwa:

“...4 orang anak saya semua masih sekolah, nda boleh putus sekolah. Soal biaya kan udah dapat bantuan PIP, kalau kurang bisa orang tua usahakan. Saya banting tulang untuk anak sekolah, apalagi ada bantuan PIP kan harusnya untuk biaya sekolah ya terbantu lah. Zaman dulu, kita ada pengalaman putus sekolah, terakhir saya cuma sampai SMP kelas 1, merasa nyesal karena malas sekolah, malu juga liat kawan lain yang sekolah bisa jadi orang. Jadi usahakan lah merubah nasib anak sama keluarga, mana tau ada yang sukses nanti. Kalau jaman sekarang ada bantuan sekolah, zaman dulu mana ada. Dulu orang tuanya nda sekolah karena rumah jauh dari sekolah, nda ada uang juga, jadi kerja bantu orang tua kesawah. Jadi sekarang suruh anak rajin sekolah apalagi sekolah udah dekat rumah...” (Wawancara tanggal 04 April 2025).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya PIP mendorong minat melanjutkan pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah. Dengan pengalaman dan kondisi yang sebelumnya pernah terjadi mendorong orang tua untuk lebih peduli akan pendidikan anak. Bantuan PIP dinilai turut membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan agar tidak terlalu besar mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga (Ramadhan et al., 2025). Selain itu faktor lingkungan sosial turut membangun kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat. Pencapaian orang lain yang berbanding dengan kesamaan nasib akan mempengaruhi minat untuk melanjutkan pendidikan.

Keputusan untuk mempertahankan pendidikan berasal dari pertimbangan rasional yang dibatasi oleh pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi, serta ketersediaan sumber daya. Bantuan PIP berperan mengurangi beban biaya pendidikan sehingga sekolah dipersepsikan sebagai pilihan yang paling memungkinkan dan menguntungkan dibandingkan membiarkan anak putus sekolah atau bekerja membantu orang tua. Selain itu, kesadaran akan adanya dukungan negara yang menjadi nilai tukar terhadap komitmen orang tua untuk mempertahankan partisipasi peserta didik.

Dalam wawancara dengan Bapak Beni Redi (37), guru sekaligus mantan operator Dapodik SDN 15 Benteng menyampaikan bahwa:

“...PIP jadi bentuk pedulinya pemerintah untuk orang kampung biar bisa sekolah, banyak anak SD ini yang dapat bantuan. Untuk angka putus sekolah disini cenderung mengalami penurunan, kemarin sempat terdata dari kami ada 4 orang yang putus sekolah dari periode 2018-2022, terakhir putus sekolah 1 orang di tahun 2022. Sebagian besar anak putus sekolah dengan alasan ekonomi, harus kerja di sawah, bahkan ada yang ke Malaysia juga. Beberapa dari mereka tu memang dapat PIP, jadi waktu sudah lulus SD tapi tidak melanjutkan SMP, ada juga yang nda ikut ujian. Kalau tahun ini ada 1 anak murid kelas saya yang udah lama nda masuk sekolah, tapi belum bisa dikatakan putus sekolah juga...” (Wawancara tanggal 04 April 2025).

Dalam wawancara dengan Ibu Yuliana Tri Tatarini (40), kepala sekolah SDN 15 Benteng juga menyebutkan bahwa.

“... Memang ada data itu sampai sekarang, jadi laporan sekolah dalam periode 2022-2025 sekitar 4 yang putus sekolah. Rata-rata memang karena biaya, jadi tidak sekolah karena harus kerja. Kalau khusus tahun 2025 ada 1 orang yang rentan putus sekolah, padahal dia dapat PIP. Sudah kita susul ke rumah yang bersangkutan, nanya ke orang tuanya karena biasa dia lari kalau bu guru kerumahnya. Tapi sayangnya sampai sekarang anak itu nda sekolah dengan alasan malu habis jatuh dari pohon. Orang tuanya sudah kita peringatkan kembali, karena semester ini dia dapat PIP juga. Jadi kemungkinan PIP tahun ini dia nda akan dapat, dan orang tua juga bilang akan mengusahakan anaknya tetap sekolah...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Data empiris SDN 15 Benteng menunjukkan kecenderungan penurunan angka putus sekolah. Berdasarkan keterangan guru dan mantan operator Dapodik, angka putus sekolah pada periode 2018–2022 tercatat sebanyak empat orang, dengan satu kasus terakhir terjadi pada tahun 2022. Alasan utama putus sekolah masih didominasi oleh faktor ekonomi, seperti keharusan bekerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun PIP mampu menekan angka putus sekolah, program ini belum sepenuhnya mampu mengeliminasi faktor struktural yang mendorong anak keluar dari sistem pendidikan. PIP telah membantu meringankan beban perekonomian peserta didik sehingga konsentrasi belajar peserta didik terjaga. Melalui

PIP meringankan tekanan ekonomi peserta didik dari keluarga berlatar belakang miskin dan rentan miskin dalam menempuh pendidikan di SDN 15 Benteng (Uriyalita et al., 2020). Bantuan PIP yang turut menjadi nilai tambah untuk pemenuhan kebutuhan dan mendorong orang tua peserta didik memastikan anak tidak putus sekolah, agar tetap mendapatkan bantuan PIP tersebut.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 15 Benteng menunjukkan bahwa risiko putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis dan sosial. Kasus peserta didik yang enggan kembali bersekolah akibat rasa malu setelah mengalami kecelakaan menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh dimensi ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas PIP bersifat terbatas apabila tidak disertai dengan pendampingan psikososial.

Dengan demikian, Program Indonesia Pintar menjadi upaya mempertahankan angka partisipasi peserta didik dengan meningkatkan minat partisipasi, serta menurunkan angka putus sekolah. Perspektif masyarakat yang mengaitkan bantuan dengan keberlangsungan pendidikan membuat mereka cenderung mempertahankan anak-anaknya tetap di sekolah selama bantuan tersedia. Bagi sebagian keluarga, bantuan ini menjadi alasan utama anak tetap bersekolah, terutama saat kondisi ekonomi sedang sulit (Fiqih et al., 2022). Namun selain karena faktor ekonomi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan anak untuk putus sekolah pada wilayah sangat tertinggal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PIP masih bersifat kondisional dan bergantung pada faktor sosial, psikologis, serta stabilitas ekonomi keluarga.

#### ***PIP Menimbulkan Ketergantungan Masyarakat***

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bantuan dana tunai yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik kurang mampu. Namun pemberian dana bantuan tunai tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara (Bernice, 2019). Ketergantungan yang terjadi dapat dinilai dari aspek ekonomi dan pembentukan pola pikir masyarakat yang pasif. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua peserta didik SDN 15 Benteng masih bergantung pada sokongan PIP untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari (Yusup et al., 2019). Ketergantungan ini tercermin dari hasil wawancara dengan Suraji, selaku orang tua peserta didik penerima manfaat PIP SDN 15 Benteng.

“... Kadang kalau sepatu atau seragamnya rusak kan kita kasihan ya, pernah juga saya mau belikan tapi uang lagi kurang, hari hujan susah motong. Jadi karena bingung, saya kadang suruh istri nanya tetangga atau ke sekolah, nanya guru yang orang sini juga, PIP kapan cair biar bisa belanja. Soalnya biasa bulan September tu dia cair, waktu itu memang belum ada info, apalagi nda pegang duit, jadi harapannya ya ada di bantuan PIP itulah, nda ada meh kita paksa pakai yang lama dulu. Sebenarnya bantuan itu terhitung kurang sih, apalagi untuk penghasilan masyarakat yang sebagian besar cuma bertani. Jadi biasa di kelas memang masih banyak yang seragamnya kurang layak karena rusak atau kotor...” (Wawancara tanggal 17 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pencairan PIP menjadi penentu utama dalam penggantian perlengkapan sekolah anak. Ketika bantuan belum cair dan kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, orang tua cenderung menunda pemenuhan kebutuhan pendidikan dan berharap pada pencairan dana PIP. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan pendidikan keluarga sangat dipengaruhi oleh keberadaan bantuan, bukan oleh perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dilianto (40), selaku admin Dapodik SDN 15 Benteng menyatakan sebagai berikut.

“...Biasa memang ada orang tua peserta didik yang datang ke sekolah, nanya anaknya dapat bantuan nda? Atau bantuan udah cair atau belum. Masyarakat kalau udah diminta data diri seperti KK, KTP kadang mikirnya pasti dapat bantuan. Untuk PIP emang nda ada kuota tetap dari pemerintah, kita pihak sekolah setiap tahun hanya mengajukan rekomendasi sesuai data siswa yang membutuhkan dan memenuhi syarat, dan hampir semua siswa pun kita rekomendasikan untuk PIP, tapi tetap saja ada yang nda dapat, ada yang dapat. Karena itu lah kita susah jawab pertanyaan orang tua kenapa nda dapat, jadi biasa kita kasi tau mungkin bertahap atau gantian sama yang lain...” (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Dalam praktiknya, keterlambatan pencairan PIP berdampak langsung pada kelayakan perlengkapan sekolah peserta didik, seperti sepatu dan seragam, yang pada akhirnya mempengaruhi kenyamanan dan kepercayaan diri peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Keputusan orang tua dalam menentukan kebutuhan pendidikan secara rasional dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan sekolah, orang tua peserta didik perlu mengatur penggunaan barang untuk jangka waktu yang panjang agar dapat lebih hemat. Penggantian atau pembelian barang keperluan sekolah yang baru harus menunggu pencairan dana PIP karena ada keperluan lain yang harus lebih dahulu dipenuhi (Yusup et al., 2019). Hal tersebut akan mempengaruhi kelayakan perlengkapan sekolah peserta didik yang turut

mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan. Selain itu dengan tidak menerima PIP dapat mendorong terjadinya angka putus sekolah pada peserta didik, karena kesulitan ekonomi yang dialami. Sebagai bentuk visualisasi kondisi lapangan, penelitian mendokumentasikan kelengkapan seragam peserta didik di SDN 15 Benteng sebagai berikut.



**Gambar 2. Penyerahan SK Rekomendasi Penerima PIP**

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Pada Gambar 2 merupakan penyerahan SK rekomendasi penerima PIP 2024. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik memiliki seragam lengkap terkhususnya seragam olahraga dan pramuka. Sebagian peserta didik menggunakan baju biasa dan menggunakan rok pramuka untuk mengganti celana olahraga. Tanpa PIP orang tua peserta didik harus berjuang dengan kondisi seadanya, sehingga kerap kali kebutuhan pendidikan menjadi tidak terpenuhi. Belum lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mendorong kesulitan bagi orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan (Hasna et al., 2025). Walaupun pendidikan dasar bersifat gratis, namun masih ada biaya tambahan seperti kebutuhan ekstrakurikuler serta kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Dengan kondisi tersebut menyebabkan peserta didik kesulitan mendapat perlengkapan sekolah yang layak (Islam, 2023).

Pilihan pendidikan masyarakat cenderung berorientasi jangka pendek dan memperkuat ketergantungan bantuan jika tidak disertai penguatan kemandirian dan kesadaran pendidikan jangka panjang (Hermawati et al., 2021). Bantuan pendidikan dipahami sebagai sumber daya yang mendorong keberlanjutan pendidikan serta membangun ekspektasi berulang terhadap bantuan (Adelia et al., 2025). PIP dinilai sebagai solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan dan jaminan atas partisipasi pendidikan (Retnaningsih, 2019). Relasi antara negara dan masyarakat penerima manfaat PIP menunjukkan hubungan timbal balik yang berpotensi membentuk ketergantungan sosial (Ramadhan et al., 2025). Pada masyarakat wilayah sangat tertinggal, keterbatasan ekonomi membuat keputusan melanjutkan pendidikan bergantung pada keberadaan PIP, sehingga tanpa bantuan tersebut risiko putus sekolah meningkat (Kholidah & Widjayatri, 2025). Ketergantungan terhadap bantuan negara masih menjadi realitas sosial di wilayah sangat tertinggal, di mana keberlanjutan pendidikan anak sering kali ditentukan oleh keberlangsungan bantuan PIP itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun PIP berkontribusi signifikan dalam meningkatkan minat partisipasi peserta didik, efektivitas jangka panjang program ini tetap memerlukan penguatan kesadaran pendidikan dan dukungan sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan agar pemerataan pendidikan tidak berhenti pada aspek pembantuan biaya semata.

## Simpulan

Program Indonesia Pintar (PIP) sangat membantu meningkatkan minat dan kelanjutan sekolah siswa di wilayah tertinggal, khususnya SDN 15 Benteng, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, karena bantuan ini meringankan beban ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sehingga anak-anak lebih percaya diri dalam belajar. Namun, dana PIP tidak selalu digunakan sepenuhnya untuk pendidikan; dalam kondisi ekonomi sulit, sering dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga yang lebih mendesak, yang menunjukkan rasionalitas terbatas keluarga dalam memprioritaskan pendidikan akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, PIP menciptakan hubungan pertukaran sosial antara negara dan masyarakat, di mana bantuan ini mendorong partisipasi sekolah tetapi juga menimbulkan ketergantungan terhadap program sebagai sumber utama biaya pendidikan, sehingga belum sepenuhnya membangun kemandirian dan perencanaan pendidikan jangka panjang di tingkat keluarga.

Oleh karena itu, keberhasilan Program Indonesia Pintar tidak cukup diukur dari aspek penyaluran bantuan secara administratif, tetapi perlu dilihat dari dampaknya terhadap perubahan persepsi, kesadaran pendidikan, dan kemandirian masyarakat. Pemerataan pendidikan di wilayah sangat tertinggal tidak hanya menuntut pembantuan biaya pendidikan, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan serta penguatan

pendampingan sosial dan literasi pendidikan agar PIP dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada satu satuan pendidikan, yaitu SDN 15 Benteng di Kabupaten Bengkayang, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah sangat tertinggal dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan dampak PIP di beberapa sekolah wilayah sangat tertinggal lain untuk mendapat gambaran lebih. Selain itu, pendidikan tidak hanya dinilai dari kuantitas, tetapi juga kualitas yang didapatkan. Sehingga perlu mengkaji strategi dalam peningkatan mutu pendidikan wilayah sangat tertinggal dan penguatan kemandirian masyarakat agar pemerataan pendidikan dapat terwujud.

## Rujukan

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press Makassar.
- Adelia, P., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan di Indonesia : Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, Dan BOS Melalui Studi Literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1158–1165. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/813>
- Adolph, R. (2025). Analisis Pelaksanaan dan Dampak Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1–23. doi:<https://doi.org/10.55681/nusra.v6i2.3359>
- Ananta, A., Brantasari, M., Anggraeni, A., & Warman. (2024). Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendas Mahakam*, 9(September), 128–135. Retrieved from <https://jurnal.fkip-uwgm.ac.id/index.php/pendasmahakam/article/view/1827>
- Apriani, S. & Nurmayanti, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Masyarakat Bajo. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3). doi:10.30651/didaktis.v18i3.1846
- Aulia, S. (2024). Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 307–315. Retrieved from <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Aulia, S, & Fernandes, R. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Batipuh. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 57–66. doi:10.24036/nara.v1i1.7
- Bernice, A. I. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sondakan. *Journal of Development and Social Change*, 11(1), 1–14. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/101229>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik Journal*, 24(2), 307–314. doi:10.46984/sebatik.v24i2.1137
- Erawati, D. A., Wiresapta Karyadi, L., & Syuhada, K. (2023). Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Lepak, Kabupaten Lombok Timur, 1, 2023.
- Esther, & Mirjam., S. (2018). Rationality and Bounded Rationality: You Can't Have One without the Other. *The European Journal of the History of Economic Thought*, 25. doi:10.1080 / 09672567.2018.1523206
- Fakih, A., & Zainal, A. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 39–45. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23200>
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar. *Kinerja 18*, 18(4), 539–546. doi:10.30872/jkin.v18i4.10097
- Hasan, I., Widodo, A., & Suratman. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. *Seminar Pendidikan Dan Pembelajaran*, 853–863. Retrieved from <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/2322>
- Hasna, I., & Febriadi, H. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Sekolah Dasar Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1111–1120. Retrieved from <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1182>
- Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *Sosio Konsepsia*, 14(1), 81–99. doi:10.33007/ska.v14i1.3501

- 
- Islam, M. F. (2023). Kondisi Ekonomi Orang Tua dan Kelangsungan Pendidikan Anak Pasca Wajib Belajar 9 Tahun; Masihkah Searah? *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 13(66), 331–350. doi:<https://journal.stai-ypbwi.ac.id/index.php/elbanat/article/view/430>
- Kaidah, S., & Ruslan. (2022). Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Pada Keluarga Miskin. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 05(03), 312–320. Retrieved from <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (n.d.). *SD- Program Indonesia Pintar-Penyuluran Per Jenjang*. [https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/jenjang\\_sekolah/130809/SD/?tahun=2024](https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/jenjang_sekolah/130809/SD/?tahun=2024)
- Kholidah, K. A., & Widjayatri, RR. D. (2025). Identifikasi Penyebab Anak Putus Sekolah : Studi Literatur. *Jurnal Jendela Cakrawala*, 1(01), 8–16. Retrieved from <https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJC/article/view/1281>
- Kustiawan, W., Taufiqurrohman, A., Syafii, A., Zainina, A., Taminta, N. L., Jannah, N. M., & Imelda, P. (2014). Teori Pertukaran Sosial. *Sosiologi.Fis.Unp.Ac.Id*, 3(1), 1–9. Retrieved from <http://sosiologi.fis.unp.ac.id/images/download/BAHAN/TEORI SOSIOLOGI MODERN.pdf>
- Muchtar, C. O.. (2025). Systematic Literature Review: Examining Indonesia's Educational Inequality Factors and Government Equity Policies. *International Journal of Educational Practice and Policy Year 2025*, 3(1), 8–16. doi:10.61220/ijep.v3i1.0257
- Muflikhan, M. (2024). *Persepsi Pemuda Terhadap Pekerjaan Sebagai Petani di Desa Klepu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo*. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/116867/>
- Mulyani, F., Ridwan, E., & Nazer, M. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar terhadap Partisipasi Sekolah di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 1328–1332. doi:10.37034/inf.v5i4.652
- Munawwarah, M. & Zubaidah, Z. (2025). Program Bantuan Pemerintah Dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(2), 282–290. Retrieved from <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla>
- Nisa, N. S., & Samputra, P. L. (2020). Analisis Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 115–135. doi:10.24815/jped.v6i2.16388
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/paradigma/article/view/66256>
- Pratiningtyas, D. (2024). Program Indonesia Pintar dan Pengeluaran Pendidikan Pada Keluarga Dengan Anak Disabilitas. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15948–15964. doi:10.36418/syntax-literate.v7i9.15119
- Purnama, R., & Puspita, M. (2024). Evaluation of The Smart Indonesian Program for Junior High School In Bandung Regency, 22(2), 44–53. Retrieved from Evaluation of The Smart Indonesian Program for Junior High School In Bandung Regency
- Ramadhan, D., Qatrunnada, A. A., Aprilia, A., & Lukitoaji, B. D. (2025). Pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap angka kasus anak putus sekolah di Indonesia. *Educreativa: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 99–107. Retrieved from <https://journal.mahsy-educreativa.com/index.php/educreativa/article/download/15/15>
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 161–177. doi:10.46807/aspirasi.v8i2.1263
- Romanti. (2023). Mengenal Program Indonesia Pintar, Salah Satu Program Prioritas Kemendikbudristek. Retrieved from <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/>
- Septiawati, S. E., Prasetyowati, T., & Nurany, F. (2022). Analisis Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Prespektif Good Governance Di Lingkungan Madrasah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 267–274. doi:10.33366/jisip.v11i3.2556
- Setyaningrum, Ana., & Harsan Toni. Fatimah, S. (2023). Efektivitas Akses Layanan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar Peserta Didik Generasi Z. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1263–1272. doi:10.62775/edukasia.v4i2.400
- Siagian, D. A. B. (2024). Evaluasi Dampak Program Bantuan Pendidikan di Sekolah Bagi Anak Miskin dan Kurang Mampu di Labuhanbatu. *Jurnal Edukatif*, 2(2), 143–149. Retrieved from <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif/article/view/638>
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. (Setiyawami, Ed.). Bandung: Alfabeta.
-

- Uriyalita, F., Syahrodi, J., & Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179–199. doi:10.31943/edumjournal.v3i2.69
- Verawati Siringoringo, M., & Purwono, R. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1539–1547. Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/113936/>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. doi:10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53